

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur:

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bawengan, G.W. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Solusi Publishing.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eko, Ridwan. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Candra M. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hiariej, Eddi O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Husein, Harun M. 2000. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husin, Kadri Husin, Rizki. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Ibrahim, Jhony. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Kuffal, H.M.A. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Leden, Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang dan Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predia Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni.

- Nugroho, Hibnu. 2011. *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Pangaribuan, Luhut M. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simorangkir, J.C.T, dkk. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:**

Iswahyudi, Sudhono. *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. Naskah dalam Seminar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No: 31 Th. 1999 jo UU NO: 20 Th. 2001. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.

Indonesia Corruption Watch. 2016. *Eksaminasi Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Dalam Gugatan Praperadilan Budi Gunawan VS KPK (Melawan Penetapan Tersangka)*. Jakarta.

Latifah, Marfuatul. 2013. "Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Info Singkat Hukum* Nomor 11 Volume V.

Purwanto, Heri. "Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP Nomor 92 Tahun 2015". *Jurnal Media Hukum* Nomor 1 Volume 23.

Rachman, Taufik. 2010. "Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana". *Jurnal Yuridika* Nomor 1 Volume 25.

Rumajar, Johana Olivia. 2014. "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen* Nomor 4 Volume III.

Rumondang, Bernadetta. 2016. "Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui Lembaga Praperadilan". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 2016.

Simbolon, Gomgoman. 2016. "Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan". *USU Law Journal*. Volume 4 Nomor 2.

Yuntho, Emerson. 2013. "Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Yayasan Rumah Sakit Islam* Nomor 2 Volume 22.

#### **Internet dan Sumber Lain:**

Safuan, Akhmad, *Korupsi, Pengadilan Batalkan SP3 Bupati Jepara*, Diakses dari: <http://www.mediaindonesia.com/news/read/113465/korupsi-pengadilan-batalkan-sp3-bupati-jepara/2017-07-18>. Pada tanggal 23 September 2017.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. *Sejarah Kejati Jateng*. Diakses dari: <http://ktjateng.kejaksaan.go.id/main/profile/sejarah.html>. Pada tanggal 30 November 2017.

Kejaksaan Republik Indonesia. *Profil Kejaksaan*. diakses dari: [https://kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3). Pada tanggal 1 Desember 2017.

Kusumasari, Diana. *Adakah Delik Aduan Yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut*. Diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut> pada tanggal 13 Oktober 2017.

Hitori, Ali. 2015. *Hak Habeas Corpus untuk Praperadilan*. [http://www.kompasiana.com/www.hitori.com/hak-habeas-corpus-untuk-praperadilan\\_54f35f88745513982b6c736e](http://www.kompasiana.com/www.hitori.com/hak-habeas-corpus-untuk-praperadilan_54f35f88745513982b6c736e). Diakses pada tanggal 20 Desember 2017.